

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Australia Government, *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act 1999)*

Buku

- Ali Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Council, S. A. (2024). *Assessing the impact of inflation and penalty unit indexation on fine amounts in Victoria*. Sentencing Advisory Council.
- Mezak, M.H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum.
- Rohmat, N. (2024). Sistem peradilan pidana. *Yogyakarta: K-Media*.
- Soerjono Soekanto (2007). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Zed Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Artikel Ilmiah

- Abdullah, S. (2016). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah balai konservasi sumber daya alam jambi (analisis kasus no. 644/pid. sus/pn. jmb). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(2), 48-72.
- Adi, W. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(4), 21-31.
- Angelina, R. Z., Suryawan, I. G. B., & Karma, N. M. S. (2019). Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 125-129.
- Angelia, T. (2025). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Anggriawan, F. (2024). Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar (Hewan Kukang) Di Wilayah Kota Batu. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 75-87.
- Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, F. A. (2016). Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.
- Bakhtiar, H. S. (2024, July). Pelaku Kejahatan Lingkungan: Jenis, Motivasi dan Penyelesaian. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 6, No. 1, pp. 321-336).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Cherief, A., Sekine, T., & Stagnol, L. (2022). The market effect of acute biodiversity risk: The case of corporate bonds. *Available at SSRN 4288552*.
- Council, N. S. (2006, October). *The Effectiveness of Fines as a Sentencing Option: Court-imposed fines and penalty notices*.
- Darmawan, B., & Johar, O. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 1(1), 37-43.
- Darmayanti, E., Oktari, D., Kartika, F. B., Yani, F., Kristianta, E., & Khairani, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial. *JUDIMAS*, 5(1).
- Dwiyana, O. B. (2015). Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(1), 115-128.
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa

- liar. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 176-186.
- Halimah, D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(1), 32-42.
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020, November). Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In *Prosiding seminar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*(Vol. 1, No. 1, pp. 161-168).
- Hayati, S. D. A. Tinjauan Yuridis Perdagangan Satwa Kukang Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Jenis Satwa yang dilindungi. *Prosiding Ilmu Hukum ISSN, 2460, 643X*.
- Khoerunisa, A. A., Hisaaby, A., Alana, A., Prameswari, S. T., & Meliyani, Y. (2026). Perdagangan Satwa Dilindungi Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 32-54.
- Lukito, R. (2022). "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 257-291.
- Pakaja, R., Imran, S. Y., & Muhtar, M. H. (2024). Kajian Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Dilindungi (Studi Pada Putusan PN Gorontalo NO. 72/PID. B/LH/2023/PN GTO. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 267-281.
- Panggabean, N., & Rahayu, M. I. F. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal. *UNES Law Review*, 6(2), 5809-5815.
- Pesak, D. N. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Lex Privatum*, 8(3).
- Priantoro, N., Rusli, T., & Satria, I. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid. B/LH/2023/Pn Kla). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(1), 62-77
- Rajagukguk, E. V. (2014). Efektivitas peraturan perdagangan satwa liar di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 216-228.
- Ramsay, I., & Webster, M. (2025). An Analysis of the Use of Civil Penalties by the Australian Securities and Investments Commission. *Federal Law Review*, 53, e10.

- Raya, B. C., & Widowaty, Y. (2021). Disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12-23.
- Suhartono, D. A. F., & Puspitosari, H. (2024). Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong. *Kabillah*, 9(2), 455-464.
- Supriyono, W., & Murtiyoso, O. (2022). Burung Endemik Indonesia Sebagai Ide Penciptaan Karya Seni Light Box. *Eduarts: Jurnal Pendidikan Seni*, 11(1), 75-86.
- Sutarno, S., & Setyawan, A. D. (2015). Indonesia's biodiversity: the loss and management efforts to ensure the sovereignty of the nation. In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-13).
- Tadon, A. C., Leo, R. P., & Wilhelmus, B. V. (2025). Tugas & Fungsi Bbksda-Gakkum Kllhk Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Jenis Biawak Timor (*Varanus Timorensis*) & Ular Malkoti (*Liasis Mackloti*) Di Wilayah Nusa Tenggara Timur. *Artemis Law Journal*, 2(2), 715-729.